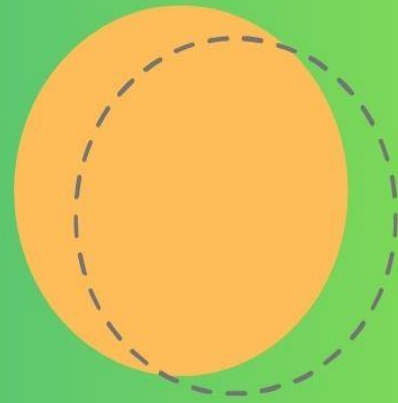




PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
KOTA BATAM**

CHECK List

Kelengkapan Bahan Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan

No	Bahan	Keterangan
1.	Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja PD yang telah ditandatangani	Ada/Tidak Ada
2.	SK Tim Penyusunan Renja PD	Ada/Tidak Ada
3.	Formulir E.70	Ada/Tidak Ada
5.	Renja Hasil cetak SIPD	Ada/Tidak Ada
REKOMENDASI		

Batam, Agustus 2023

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman
dan Pertamanan
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Bapelitbangda


Syalimin, S.IP
19901025 2010101001

.....

Formulir E.70

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja
Perangkat Daerah Kota Batam**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.		√		
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.		√		
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.		√		
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		√		
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.		√		
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Batam, Agustus 2023

Kepala Dinas

Perumahan Rakyat

Permukiman Dan Pertamanan

Kota Batam,


 Drs. Eryudhi Apriadi
 Pemimpin Muda
 NIP. 19600425 198909 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat Rencana Kerja sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam merupakan suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan Tahun 2023 tahapan pelaksanaan Perubahan APBD. Tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah ini sebagai dokumen perubahan perencanaan program kerja anggaran tahunan dan kegiatan pembangunan yang berisi arah kebijakan, strategi pembangunan dan program khususnya di Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Urusan Lingkungan Lingkungan Hidup khususnya pengeloaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023 ini, semoga dapat memberikan gambaran sebagai dasar penetapan kinerja dan anggaran perangkat daerah tahun 2023 dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD agar terlaksanan dengan efektif dan efisien dan terwujudnya keselarasan antara perencanaan dan realisasi kinerja yang relevan.

Batam, Agustus 2023

Kepala Dinas
Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan
Kota Batam



Drs. ERYUDHI APRIADI
NIP. 19590425 198909 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBARiv

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 4

1.3 Maksud dan Tujuan 9

1.4 Sistematika Penyusunan 9

BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II 11

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 18

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023 20

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023..... 45

BAB. IV PENUTUP

..... 68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023..... 12

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, dan Pertamanan Kota Batam 19

Tabel 3.2 Perubahan Belanja APBD 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam..... 21

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Batam 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Renja Dinas dengan RPJMD, Renstra K/L, dan
Renstra Perangkat Daerah Provinsi 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ,Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Tahun Anggaran 2023 merupakan perubahan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2021-2026. Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor : 014/000.7.2/VI/2023 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023 ini berisi kebijakan pembangunan infrastruktur yaitu Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Permukiman dan Bidang Pertamanan dan kegiatan pendukung lainnya yang diselenggarakan dengan program pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi baik yang akan dibiaya langsung oleh APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kota

tahun 2023 serta penyesuaian program dan kegiatan atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 yang memerlukan perbaikan sesuai dengan kondisi pelaksanaan dilapangan sehingga lebih tepat sasaran dan pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja efektif dan efisien.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bagian Ketujuh, Paragraf 1 Pasal 125, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Renja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan yang dimulai dari :

1. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah akan dijadikan sebagai bahan dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah.

3. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

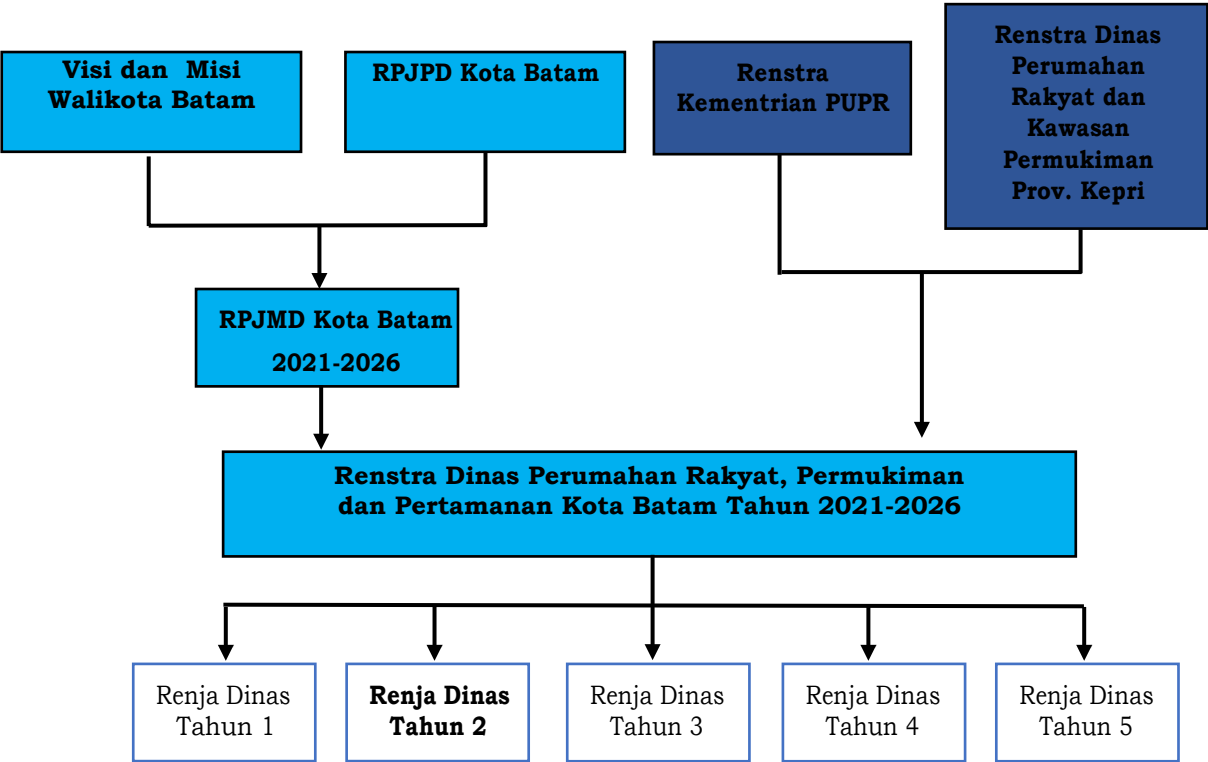
Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.

4. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan yang menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.1.3 Keterkaitan Antar Renja Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Lainnya

Gambar 1.1 Keterkaitan Renja Dinas dengan RPJMD, Renstra K/L, dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2021-2025;
40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
44. Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam;
45. Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, Dan Batu Aji Kota

- Batam Tahun 2021-2041 2041 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 847);
46. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
 47. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. (Khusus untuk Kecamatan dan Perkimtan);
 48. Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023;
 49. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor : 014/000.7.2/VI/2023 Tentang Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 50. Peraturan Walikota Batam Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 yang telah dilaksanakan dan acuan kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun Anggaran 2023 dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuannya adalah sebagai pedoman/landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) dan acuan penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah (P-RKA PD).

1.4. Sistematika Penyusunan

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun Anggaran 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD
- 3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023
- 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023

Tabel. T-C 29
OPD : Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan

N o	Organisasi	Sub Organisa si	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	IKSK	Targe t Kinerj a T1	Realisa si Kinerja T1	Targe t Kinerj a T2	Realisa si Kinerja T2	Targe t Kinerj a T3	Realisa si Kinerja T3	Targe t Kinerj a T4	Realisa si Kinerja T4
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sasaran Pelaksana Jasa Pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi	13	15	13	7	13		13	
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1	1	1	1	1		1	
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang di Kelola	7	31	7	7	7		7	

4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	0	1	0	1		1	
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1	0	1	0	1		1	
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3	0	3	0	3		3	
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Jenazah yang dilayani pemakamannya	25	12	25	12	25		25	
8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebun Raya	Luasan Kebun Raya yang dikelola	29	28	29	28	29		29	
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	0	1	1	1		1	

10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	2	30	6	30		30	
11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	62	1	1	1		1	
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1	1	1	2	1		1	
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3	0	3	1	3		3	
14	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	0	1	1	1		1	

15	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	55	0	55	0	55		55	
16	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3	0	3	0	3		3	
17	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara diperkotaan	281	100	281	26	281		281	
18	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11	0	11	3	11		11	
19	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luasan Taman Keanekaragaman hayati yang dibangun / ditingkatkan	0	0	0	0	0		0	
20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji/diberi tunjangan	60	52	60	51	60		60	

21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	25	0	25	8	25		25	
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	1		1	
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	3	12	6	12		12	
24	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	0	1	0	1		1	
25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	0	5	1	5		5	

26	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMAMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	28	10	28	12	28		28	
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMAMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luasan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola	174	174.45	174	174.45	174		174	
28	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMAMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20	2	20	7	20		20	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Adapun Tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ruang terbuka hijau yang terpadu dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau di wilayah perkotaan.
3. Mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau di wilayah hinterland.

3.1.2 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dan orientasi pada hasil serta dapat dicapai dalam periode tertentu. Adapun Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman
2. Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan.
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan administrasi kesekretariatan.
4. Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah hinterland.

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, dan Pertamanan Kota Batam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan ruang terbuka hijau yang terpadu dan berkelanjutan		Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara
2	Mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau di wilayah perkotaan		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman di Wilayah Perkotaan
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan	Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan
			Persentase Lingkungan Perumahan / Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Perkotaan
			Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan
			Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Persentase nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah
3	Mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau di wilayah hinterland		Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman di wilayah hinterland
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah hinterland	Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland
			Persentase Lingkungan Perumahan / Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di

			Wilayah Hinterland
			Persentase Penurunan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland
			Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10,000,000,000	7,500,000,000	(2,500,000,000)
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	10,000,000,000	7,500,000,000	(2,500,000,000)
			Jumlah Pendapatan	10,000,000,000	7,500,000,000	(2,500,000,000)
5			BELANJA			
5	1		BELANJA OPERASI	40,228,781,011	37,965,159,219	(2,263,621,792)
5	1	01	Belanja Pegawai	9,645,383,525	9,250,119,633	(395,263,892)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30,050,955,350	28,182,597,450	(1,868,357,900)
5	1	05	Belanja Hibah	532,442,136	532,442,136	0
5	2		BELANJA MODAL	81,204,448,876	84,122,033,337	2,917,584,461
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,025,173,700	931,444,100	(93,729,600)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16,533,458,312	10,411,169,323	(6,122,288,989)
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63,645,816,864	72,779,419,914	9,133,603,050
			Jumlah Belanja	121,433,229,887	122,087,192,556	653,962,669
			Total Surplus/(Defisit)	(111,433,229,887)	(114,587,192,556)	(3,153,962,669)
6			PEMBIAYAAN			

Sumber Data : SIPD Kementerian Dalam Negeri

Tabel 3.2
Perubahan Belanja APBD 2023
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

NO		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PAGU APBD MURNI 2023	PAGU PERUBAHAN APBD 2023	Lebih/Kurang dari murni	KETERANGAN
1		2				3	4	5 = 3 - 4	6
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA BATAM						121,433,229,887.00	122,087,192,556.00	653,962,669.00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					101,278,630,056.00	104,049,632,225.00	2,771,002,169.00	
I	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12,671,991,945.00	12,300,813,525.00	371,178,420.00	
		1	1.04.01.2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		9,659,133,525.00	9,263,869,633.00	- 395,263,892.00	
				SUB KEGIATAN		9,659,133,525.00	9,263,869,633.00	- 395,263,892.00	
			1	1.04.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	9,481,463,525.00	9,086,199,633.00	- 395,263,892.00	Pengurangan nilai TPP 1 Bulan
			2	1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	177,670,000.00	177,670,000.00	-	TETAP
		2	1.04.01.2.05	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		85,460,000.00	85,460,000.00	-	
				SUB KEGIATAN		85,460,000.00	85,460,000.00	-	
			1	1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	85,460,000.00	85,460,000.00	-	TETAP
		3	1.04.01.2.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		535,474,500.00	411,952,500.00	- 123,522,000.00	
				SUB KEGIATAN		535,474,500.00	411,952,500.00	- 123,522,000.00	

			1	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,505,000.00	4,505,000.00	-	TETAP
			2	1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	255,409,500.00	185,328,500.00	- 70,081,000.00	Pengurangan belanja pakai habis
			3	1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129,600,000.00	129,600,000.00	-	TETAP
			4	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,600,000.00	27,000,000.00	- 3,600,000.00	Pengurangan Volume Barang yang di Cetak
			5	1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,200,000.00	7,200,000.00	-	TETAP
			6	1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108,160,000.00	58,319,000.00	- 49,841,000.00	Pengurangan SPPD hasil pembhaasan TAPD
		4	1.04.01.2.07	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		894,844,500.00	791,528,500.00	- 103,316,000.00	
				SUB KEGIATAN		894,844,500.00	791,528,500.00	- 103,316,000.00	
			1	1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	117,750,000.00	117,750,000.00	-	TETAP
			2	1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	777,094,500.00	673,778,500.00	- 103,316,000.00	
		5	1.04.01.2.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1,070,363,920.00	1,030,718,320.00	- 39,645,600.00	
				SUB KEGIATAN		1,070,363,920.00	1,030,718,320.00	- 39,645,600.00	
			1	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	381,000,000.00	381,000,000.00	-	TETAP
			2	1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,250,000.00	5,250,000.00	-	TETAP
			3	1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	684,113,920.00	644,468,320.00	- 39,645,600.00	Pengurangan Jumlah Tenaga THL
		6	1.04.01.2.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		426,715,500.00	717,284,572.00	290,569,072.00	
				SUB KEGIATAN		426,715,500.00	717,284,572.00	290,569,072.00	

			1	1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	383,035,500.00	400,635,500.00	17,600,000.00	Penambahan Biaya Bayar Pajak Kendaraan Tertunggak 2 unit. 1 Motor 1 Dum truck
			2	1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,680,000.00	43,680,000.00	-	TETAP
			3	1.04.01.2.06.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	272,969,072.00	272,969,072.00	TETAP
II	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				10,937,900,020.00	11,155,788,420.00	217,888,400.00	
		1	1.04.02.2.01	KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA		333,712,750.00	333,712,750.00	-	
				SUB KEGIATAN		333,712,750.00	333,712,750.00	-	
			1	1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	129,999,000	129,999,000.00	-	TETAP
			2	1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	203,713,750	203,713,750.00	-	TETAP
		2	1.04.02.2.05	KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM dan/atau RUMAH KHUSUS		10,447,095,170.00	10,671,505,170.00	224,410,000.00	
				SUB KEGIATAN		10,447,095,170.00	10,671,505,170.00	224,410,000.00	
			1	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1,885,773,970.00	1,885,773,970.00	-	TETAP
			2	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (UPT RUSUN)	8,561,321,200.00	8,785,731,200.00	224,410,000.00	Penambahan Listrik 3 Bulan
		3	1.04.02.2.06	KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN		157,092,100.00	150,570,500.00	6,521,600.00	
				SUB KEGIATAN		157,092,100.00	150,570,500.00	6,521,600.00	
			1	1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	157,092,100.00	150,570,500.00	- 6,521,600.00	Pengurangan biaya JKK, JKM

III	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				77,668,738,091.00	80,593,030,280.00	2,924,292,189.00	
		1	1.04.05.2.01	KEGIATAN URUSAN ENYELENGARAAN PSU PERUMAHAN		77,668,738,091.00	80,593,030,280.00	2,924,292,189.00	
				SUB KEGIATAN		77,668,738,091.00	80,593,030,280.00	2,924,292,189.00	
			1	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	532,174,500.00	532,174,500.00	-	TETAP
			2	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	74,559,574,171.00	77,472,438,360.00	2,912,864,189.00	Rasionalisasi, Perubahan dan Penambahan Pokir pindah masuk serta tambahan rasio renja bg muda
								2,912,864,189.00	-
					Dokumen Lingkungan Penataan Kawasan Permukiman Kec. Belakang Padang (Lang Lang Laut)	100,000,000	-	- 100,000,000.00	
					Penataan Kawasan Permukiman Kec. Belakang Padang (Lang Lang Laut)	5,905,349,556	-	- 5,905,349,556.00	
					Penataan Kawasan Permukiman Kec. Belakang Padang (Lang Lang Laut) (Konsultan Pengawas)	162,499,305		- 162,499,305.00	
					JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Bengkong Indah 3 RT 04 RW 07, Kel. Sadai Kec. Bengkong	215,944,000	151,058,000	- 64,886,000.00	
					JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Bengkong Kolam Gang Mesjid Alkadar Blok C RT. 01 RW. 03 Kel. Sadai Kec. Bengkong		176,538,000	176,538,000.00	
					JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Bengkong PBN RT 05 RW 13, Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong	191,386,000		- 191,386,000.00	

				JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Bengkong Telaga Indah RT 01 RW 18, Kel. Sadai Kec. Bengkong	186,982,000	92,766,400	- 94,215,600.00	
				JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Bengkong Telaga Indah RT 02 RW 18, Kel. Sadai Kec. Bengkong		169,000,000.00	169,000,000.00	
				JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Bengkong Telaga Indah RT 03,06 RW 18, Kel. Sadai Kec. Bengkong	169,000,000.00	-	- 169,000,000.00	
				JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Bengkong Wahyu RT 04 RW 17, Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong	241,550,000.00	235,930,000.00	- 5,620,000.00	
				JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Bengkong Wahyu RT 04 RW 17 Kelurahan Tanjung Buntung Kec. Bengkong	202,734,000.00	215,944,000.00	13,210,000.00	
				JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kavling Jujur RT 02 RW 20 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong		243,410,000.00	243,410,000.00	
				JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Komp. Akasia RT 05 / RW 12 Kel. Sadai Kec. Bengkong		239,620,000.00	239,620,000.00	
				JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Komp. YKB RT 03 RW 11, Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong	83,072,000.00	147,958,000.00	64,886,000.00	
				JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum PKJ RT 01 RW 14, Kel. Sadai Kec. Bengkong	191,386,000.00	-	- 191,386,000.00	

					JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pesona Mantang RT. 04 RW. 15, Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong	176,538,000.00	-	- 176,538,000.00	
					JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT 03 RW 14 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong		191,386,000.00	191,386,000.00	
					JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT 1 RW 15 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong		241,550,000.00	241,550,000.00	
					JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT 1 RW 20 Tanjung Buntung Jaya, Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong		243,410,000.00	243,410,000.00	
					JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT 2 RW 15 Pesona Mantang Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong		241,550,000.00	241,550,000.00	
					JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Sei Nayan RT. 03 RW. 012 Kel. Sadai Kec. Bengkong		255,875,000.00	255,875,000.00	
					JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Sei Tering II RT 02, 06, RW. 005Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar		241,550,000.00	241,550,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Anggrek Pemail antara RT 01 DAN RT 02 , RW 07, Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja	341,790,000.00	-	- 341,790,000.00	

					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Bida Garden 1 RT 01 RW 37 Kel. Belian Kec. Batam Kota		256,398,000.00	256,398,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Botania RW. 043 Kel. Belian Kec. Batam Kota		203,750,000.00	203,750,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Bukit Beruntung RW. 09, Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota		300,635,000.00	300,635,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Citra Indah Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota		228,506,500.00	228,506,500.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Garden Point 2 Blok A RT 06 RW 06, Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja		219,867,000.00	219,867,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Garden Point 2 Blok H RT 06 RW 06, Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja	219,867,000.00	-	- 219,867,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Komplek Golden Gate RT 02 RW 10, Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja	201,080,000.00	-	- 201,080,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Anggrek Mas I Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota (lanjutan)		228,964,000.00	228,964,000.00	

					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Cemara Garden RT 01 RW 16, Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota	202,846,000.00	-	- 202,846,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Citra Indah RT. 02 RW. 06 Kel. Tering Kec. Batam Kota		230,425,600.00	230,425,600.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Garden Point Indah Blok C dan D RT 08 RW 06, Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja	244,274,000.00	-	- 244,274,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Oma RW 12 RT 01, Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota	206,986,000.00	-	- 206,986,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Oma RW 12 RT 02, Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota	-	206,986,000.00	206,986,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Palm Regency 2 RT 01 RW 23 Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota	-	244,274,000.00	244,274,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Pondok Indah Blok C D E RT 01 RW 07 Simpang Kara, Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota	300,635,000.00	-	- 300,635,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Pondok Indah Blok E F G Simpang Kara RT 01 RW 07, Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota	203,750,000.00	-	- 203,750,000.00	

					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Pondok Indah RT 01 RW 07, Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota	-	203,750,000.00	203,750,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan RT. 4 RW. 1, Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja	-	35,045,000.00	35,045,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan RT.4 RW. 3 Kel. Tanjung Uma Kec. Batam Kota	-	47,155,000.00	47,155,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Taman BPD RT 01 RW 014 Kel. Belian Kec. Batam Kota	-	161,690,000.00	161,690,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Oma RT 1 RT 2 RW 12 Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota	-	241,742,000.00	241,742,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Puriloka Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota	-	209,350,000.00	209,350,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Taman Lavender RT. 01 - RT. 02 RW. 52 Kel. Belian Kec. Batam Kota	-	192,874,000.00	192,874,000.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Valencia 3 RW. 025 Kel. Belian Kec. Batam Kota	-	241,550,000.00	241,550,000.00	

					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Simpang Raya Indah RT 03 RW 12 Kel. Belian Kec. Batam Kota	-	222,580,500.00	222,580,500.00	
					JL2 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Masuk Utama Komplek Aku Tahu 2 dan 3 RW 13 Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota	-	137,050,000.00	137,050,000.00	
					JL3 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Bida Ayu Blok S RT.03 RW.15 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk	-	158,020,000.00	158,020,000.00	
					JL3 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kavling Nusa Jaya RT 03 RW 08 Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk	-	98,405,000.00	98,405,000.00	
					JL3 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kavling Seraya RT 003 RW. 001 Kel. Sambau Kec. Nongsa	-	79,985,000.00	79,985,000.00	
					JL3 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Bukit Kemuning Blok A RT. 001/ RW 016 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk	-	94,043,300.00	94,043,300.00	
					JL3 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Bukit Kemuning Blok F RT. 006 RW. 016, Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk	-	181,645,000.00	181,645,000.00	
					JL3 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Pondok Graha Blok A RT 001/004, Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk	108,641,000.00		- 108,641,000.00	

					JL3 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Sambau RT 02 RW 12 Kel. Sambau Kec. Nongsa	-	177,561,200.00	177,561,200.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Gang Blok F Sagulung Bersatu RT 3 RW 9, Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung	104,468,000.00	30,106,500.00	- 74,361,500.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Griya Batu Aji Asri RT 01 RW 18, Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung	203,750,000.00	-	- 203,750,000.00	
					L4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kavling Bukit Kamboja RT 006 RW 015 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung	-	114,739,400.00	114,739,400.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kavling Bukit Seroja Blok I RT. 003 RW. 008 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung	-	33,726,000.00	33,726,000.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kavling Flamboyan RT 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 RW. 2 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung	-	204,319,600.00	204,319,600.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kavling Flamboyan RT 2 RW 2, Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung	254,918,000.00		- 254,918,000.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kavling Sagulung Abadi Jaya RT 04 / RW 03, Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung	79,970,000.00	-	- 79,970,000.00	

					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Kav. Nato Permata Blok D2 RT 05 RW 02, Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung	-	149,115,800.00	149,115,800.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Parisa Indah RT.01 RW.26 Blok C4 No 14 S/d 26, Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung	149,811,600.00		- 149,811,600.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Artha Indah RW 18 RT 01-05, Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung	147,958,000.00	-	- 147,958,000.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Permata Rhabayu II RT. 03 RW. 18 Kel. Tembesi Kec. Sagulung	-	186,982,000.00	186,982,000.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Phoenix Garden RT 06 RW 18 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung	-	217,392,100.00	217,392,100.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Rosinton Raya RW. 07, Kel. Tembesi Kec. Sagulung	-	147,958,000.00	147,958,000.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Sari Padjajaran Blok F, RT.03 RW.08, Kel. Tembesi Kec. Sagulung	161,690,000.00	4,719,000.00	- 156,971,000.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Sekarwangi RT.01 RW.09, Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung	244,274,000.00		- 244,274,000.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Taman Anugerah RT.02 RW.15, Kel. Tembesi Kec. Sagulung	186,982,000.00	-	- 186,982,000.00	

				JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Taman Cipta Asri Blok. I, RT.03 RW.12, Kel. Tembesi Kec. Sagulung	-	161,690,000.00	161,690,000.00	
				JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Villa Muka Kuning RT.02,05,06 RW.10, Kel. Tembesi Kec. Sagulung	777,472,000.00	569,003,400.00	- 208,468,600.00	
				JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum Buana Impian I RT 02 RW 14, Kel. Tembesi Kec. Sagulung	171,240,000.00		- 171,240,000.00	
				JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum Griya Batu Aji Asri RT 01 RW 026, Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung	255,875,000.00	-	- 255,875,000.00	
				JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Marina Green RT 03 / RW 12, Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji	181,645,000.00	-	- 181,645,000.00	
				JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Medio Raya RT. 03 RW. 024 Kel. Tembesi Kec. Sagulung	-	206,234,000.00	206,234,000.00	
				JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum Perisa Indah RT 03 RW 026, Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung	315,790,000.00	241,550,000.00	- 74,240,000.00	
				JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Permata Rhabayu RT 1 RW 18, Kel. Tembesi Kec. Sagulung	-	74,954,000.00	74,954,000.00	

					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Permata Rhabayu RT 2 RW 18, Kel. Tembesi Kec. Sagulung (lanjutan)	-	220,229,300.00	220,229,300.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Villa Muka Kuning RT. 03 RW. 10 Kel. Tembesi Kec. Sagulung	-	198,810,000.00	198,810,000.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 01 RW. 15, Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung	-	48,204,000.00	48,204,000.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 06 RW. 14 Taman Batu Aji Indah, Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung	-	146,505,000.00	146,505,000.00	
					JL4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT 1,2 RW 18, Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung	161,690,000.00	-	- 161,690,000.00	
					JL5 pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan Fanindo RT.002, RT 005/RW.006 Blok X & W kel.tg Uncang Kec Batu Aji	-	221,082,000.00	221,082,000.00	
					JL5 pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan Fanindo RT.003/RW.006 Blok X & W kel.tg Uncang Kec Batu Aji	190,708,000.00	-	- 190,708,000.00	
					JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kartini I, Kel Sungai Harapan Kec. Sekupang	-	230,425,600.00	230,425,600.00	

					JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kavling KSB Mentarau RT 07 RW 10 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang	-	161,690,000.00	161,690,000.00	
					JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Marina Garden RT 05 RW 12 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji	-	165,924,400.00	165,924,400.00	
					JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Marina View, Kel. Tanjung Uncang Kec. Batam Kota	-	94,466,000.00	94,466,000.00	
					JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Fanindo RT.003/RW.006 BLOK X & W, Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji (Konsultan Perencana + Konsultan Pengawas)	30,374,000.00	-	- 30,374,000.00	
					JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Tembesi Center RT 01/ RW 02, Kel. Kibing Kec. Batu Aji	158,020,000.00	11,960,000.00	- 146,060,000.00	
					JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Victoria RT 02 RW 16 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang	-	191,386,000.00	191,386,000.00	
					JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Bukit Tiban Permai Blok A, B dan J RW. 15 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang	-	136,729,000.00	136,729,000.00	
					JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum De Puri Blok C dan D RT 003 RW 15, Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang	176,087,500.00	-	- 176,087,500.00	

				JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Glory RT. 04, RW. 04, Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang	191,386,000.00	-	- 191,386,000.00	
				JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Marina Green RT 03 / RW 18, Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji	-	181,645,000.00	181,645,000.00	
				JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Pesona Rhabayu RT 01 RW 12, Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang	131,732,500.00	-	- 131,732,500.00	
				JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Taman Lestari RT.001, 002, 004/RW.014 , B4 & B5, B6 & B7, B12 & B13, Kel. Kibing Kec. Batu Aji	308,450,000.00	231,873,100.00	- 76,576,900.00	
				JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum Taman Pesona Indah Blok F4 Dan F3 RT.005, 002/RW.009, Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji	351,893,000.00	115,771,600.00	- 236,121,400.00	
				JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Tiban 1 Blok D RT 2 RW 3, Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang	161,690,000.00	-	- 161,690,000.00	
				JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum. Victoria RT 04 RW 16, Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang	215,060,000.00	-	- 215,060,000.00	
				JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pondok Pratiwi 3 RT 04 RW 16 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang	-	215,060,000.00	215,060,000.00	
				JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pondok Pratiwi II Blok GG RT.003/RW.016, Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang	126,246,000.00	-	- 126,246,000.00	

				JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Purimas RT 01 RW 22 Kel. Buliang Kec. Batu Aji	-	186,982,000.00	186,982,000.00	
				JL5 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Tiban Indah RW 07 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang	-	101,238,400.00	101,238,400.00	
				JLH Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pantai Melayu RT.04 RW.02, Kel. Rempang Cate Kec. Galang	178,271,328.00	-	- 178,271,328.00	
				Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dalam Rangka Penunjang Kegiatan Karya Bakti TNI-AD Kodim 0316 Batam Tahun 2023 (Biaya Sewa Alat Berat)	-	57,855,452.00	57,855,452.00	
				Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dalam Rangka Penunjang Kegiatan Karya Bakti TNI-AD Kodim 0316 Batam Tahun 2023 (Honorarium Pembantu Tukang)	-	178,100,000.00	178,100,000.00	
				Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dalam Rangka Penunjang Kegiatan Karya Bakti TNI-AD Kodim 0316 Batam Tahun 2023 (Honorarium Tenaga Ahli Perorangan)	-	30,000,000.00	30,000,000.00	
				Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dalam Rangka Penunjang Kegiatan Karya Bakti TNI-AD Kodim 0316 Batam Tahun 2023 (Pengadaan Alat Bantu dan Penyelenggaraan SMKK)	-	57,194,500.00	57,194,500.00	
				Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dalam Rangka Penunjang Kegiatan Karya Bakti TNI-AD Kodim 0316 Batam Tahun 2023 (Pengadaan Material)	-	1,058,954,500.00	1,058,954,500.00	
				Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dalam Rangka Penunjang Kegiatan TMMD TNI-AD Kodim 0316 Batam Tahun 2023	2,222,250,000.00	-	- 2,222,250,000.00	

				Penunjang Kegiatan TMMD TNI-AD Kodim 0316 Batam Tahun 2023 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kavling Baru Sambau (Honorarium Tenaga Ahli Perorangan)	-	30,000,000.00	30,000,000.00	
				Penunjang Kegiatan TMMD TNI-AD Kodim 0316 Batam Tahun 2023 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kavling Baru Sambau (Pengadaan Alat Bantu dan Penyelenggaraan SMK)	-	66,730,500.00	66,730,500.00	
				Penunjang Kegiatan TMMD TNI-AD Kodim 0316 Batam Tahun 2023 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kavling Baru Sambau (Pengadaan Bahan dan Material)	-	1,963,317,140.00	1,963,317,140.00	
				Penunjang Kegiatan TMMD TNI-AD Kodim 0316 Batam Tahun 2023 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kavling Baru Sambau (Sewa Alat Berat)	-	162,202,360.00	162,202,360.00	
				JLH Pembangunan/Rehabilitasi Jerambah Kampung Tanjung RT 03, RT 05 RW 04 Kel. Tanjugn Sari Kec. Belakang Padang	-	251,070,345.00	251,070,345.00	
				JLH Pembangunan/Rehabilitasi Jerambah RT 03 RW 06 Kel. Galang Baru Kec. Galang	-	251,070,345.00	251,070,345.00	
				BM1 Pembangunan/ Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/ Batu Miring RT 05 RW 1 Kel Sadai Kec. Bengkong	-	246,549,000.00	246,549,000.00	
				BM1 Pembangunan/ Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/ Batu Miring RT.07 RW.02 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong (BTT 2023)	-	1,599,163,500.00	1,599,163,500.00	
				BM2 Pembangunan/ Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/ Batu Miring Komplek Kapital Raya RT. 001 RW. 021 Kel. Belian Kec. Batam Kota	-	131,908,000.00	131,908,000.00	

					BM2 Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Batu Miring (Lingkungan Perumahan) Perumahan Taman Lavender RT 01 - RT 02 RW 52, Kel. Belian Kec. Batam Kota	341,730,000.00	-	- 341,730,000.00	
					BM2 Pembangunan/ Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/ Batu Miring MI Al Muttaqin, Kel. Tanjung Uma Kec. Batam Kota	-	203,540,000.00	203,540,000.00	
					BM3 Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Batu Miring (Lingkungan Perumahan) Perumahan Jasinta RT 01 RW 06, Kel. Kabil Kec. Nongsa	180,076,000.00	-	- 180,076,000.00	
					BM3 Pembangunan Tembok Penahan Tanah/Batu Miring Depan Perum Puri Agung IV RW 21, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk (Utang 2022)	-	421,927,925.00	421,927,925.00	
					BM4 Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Batu Miring Medio Raya, Kel. Tembesi Kec. Sagulung	-	233,721,330.00	233,721,330.00	
					BM5 Pembangunan/ Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/ Batu Miring RT.06 RW.012 Kel. Tiban Lama Kec. Sekupang (BTT 2023)	-	260,851,500.00	260,851,500.00	
					BM5 Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Batu Perbatasan antara Perum Cluter Melati Residence dan Pine Garden RW 18 dengan Perum Villa Diamond RW 20, Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang	-	221,202,400.00	221,202,400.00	
					BMH Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Batu Miring Pulau Nguan RT 02 RW 04, Kel. Galang Baru, Kec. Galang	220,949,940.00		- 220,949,940.00	
					D1 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Bengkong Abadi II RT 06 RW 04, Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong	90,329,700.00		- 90,329,700.00	
					D1 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Bengkong Permai RT 01 sd RW 02, Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong	108,185,000.00	-	- 108,185,000.00	

				D1 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Bengkong RW 13 Bengkong Nusantara Kel. Sadai Kec. Bengkong	-	132,800,000.00	132,800,000.00	
				D1 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Bengkong Sadai RT 01 RW 10, Kel. Sadai Kec. Bengkong (lanjutan)	-	198,542,400.00	198,542,400.00	
				D2 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Bida Garden 1 RT 01 RW 37 Kel. Belian Kec. Batam Kota	-	138,110,000.00	138,110,000.00	
				D2 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Perumahan Cemara Garden RT 01 RW 16, Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota	-	202,701,600.00	202,701,600.00	
				D2 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan RT 2 RW 6, Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja	226,255,400.00		- 226,255,400.00	
				D3 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Bida Ayu Blok S RT.03 RW.15 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk	-	165,140,000.00	165,140,000.00	
				D3 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Kav. Manggis RT 04/ RW 013, Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk	165,140,000.00		- 165,140,000.00	
				D3 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Permata Asri RT.06 RW.02 Kel. Duriangkang Kec. Sungai Beduk	-	226,590,000.00	226,590,000.00	
				D3 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Perumahan Bukit Kemuning Blok C RT 005/RW016, Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk	-	118,553,200.00	118,553,200.00	
				D3 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Perum Pancur Biru Lestari 2 RT.02 RW.03 Kel. Duriangkan Kec. Sei Beduk	-	45,570,000.00	45,570,000.00	

					D4 Pembangunan Drainase Kavling Sagulung Abadi Jaya RT 03 / RW 03, Kel. Sei Lekop Kec. Sagulung	-	80,305,000.00	80,305,000.00	
					D4 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Kavling Bukit Melati RT 02 RW 06, Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung	252,996,000.00	226,590,000.00	- 26,406,000.00	
					D4 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Kavling Kamboja RT. 001 RW. 003 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung	-	102,670,000.00	102,670,000.00	
					D4 Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Permukiman Kavling Seroja RW 07, Kel. Sungai Pelunggut, Kec. Sagulung (Utang 2022)	-	119,971,321.00	119,971,321.00	
					D4 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan RW 03, Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung	-	133,098,000.00	133,098,000.00	
					D4 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Tembesi Lestari RT. 002 RW. 004 Kel. Tembesi Kec. Sagulung	-	69,868,000.00	69,868,000.00	
					D5 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan KSB Tiban Mentarau RT.004/RW.010, Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang	72,850,000.00	-	- 72,850,000.00	
					D5 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Muka Kuning Indah 1 Blok CB RT.003/RW.007, Kel. Buliang Kec. Batu Aji	43,364,000.00	-	- 43,364,000.00	
					D5 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Pancur Biru Lestari RW 03 Kel. Duriangkang Ke. Sungai Beduk	-	243,925,000.00	243,925,000.00	

					D5 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Perum. Griya Pratama RT 12 RW 18, Kel. Buliang Kec. Batu Aji	174,650,000.00	-	- 174,650,000.00	
					D5 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan RT 006 RW 010 Kel.Patam Lestari Kec. Sekupang	-	72,850,000.00	72,850,000.00	
					D5 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Tiban III RT.001/RW.005, Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang	284,160,000.00	-	- 284,160,000.00	
					D5 Pembangunan/Rehabilitasi Drainase/Saluran Lingkungan Tiban Indah RW 05 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang	-	174,650,000.00	174,650,000.00	
			3	1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2,257,200,920.00	2,285,400,920.00	28,200,000.00	Penambahan Volumen Pendamping Kejaksaaan dari 3 menjadi 5 orang DAN Kekurangan BPJS
			4	1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	319,788,500.00	303,016,500.00	- 16,772,000.00	Pengurangan Volume Belanja
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					20,154,599,831.00	18,037,560,331.00	2,117,039,500.00	
IV	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				20,154,599,831.00	18,037,560,331.00	2,117,039,500.00	
		1	2.11.04.2.01	KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA		20,154,599,831.00	18,037,560,331.00	2,117,039,500.00	
				SUB KEGIATAN		20,154,599,831.00	18,037,560,331.00	2,117,039,500.00	
			1	2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	10,301,225,000.00	10,045,915,800.00	- 255,309,200.00	Rasionalisasi Pemeliharaan Taman Buah Madani
			2	2.11.04.2.01.03	Pengelolaan Kebun Raya	1,806,514,800.00	1,721,158,500.00	- 85,356,300.00	Pengurangan Volumen Belanja
			3	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3,972,261,450.00	2,195,887,450.00	- 1,776,374,000.00	Pengurangan Biaya Pemakaman Umum, Belanja Modal PJU, Pengurangan SPPD dll
			4	2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	4,074,598,581.00	4,074,598,581.00	-	TETAP

								-	
					Belanja Modal Taman (Fasum Puri Agung IV Tahap 2 Blok B3-C3 RW 25, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam)	257,398,900.00	257,398,900.00	-	
					Belanja Modal Taman (Fasum RW 23 Blok B Perumahan Puri Agung III, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam)	193,049,175.00	193,049,175.00	-	
					Belanja Modal Taman (Kav. Pesona RT. 01 RW. 13, Kel. Sei Lekop, Kec. Sagulung)	257,398,900.00	257,398,900.00	-	
					Belanja Modal Taman (Komplek Anggrek Permai RW 06, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam)	193,049,175.00	193,049,175.00	-	
					Belanja Modal Taman (Pembangunan Taman Type E)	257,398,900.00	257,398,900.00	-	
					Belanja Modal Taman (Perumahan Anggrek Mas III RW 021 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam) (Pembangunan Taman Type E)	193,049,175.00	193,049,175.00	-	
					Belanja Modal Taman (Perumahan Bida Asri I RW 09, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam)	257,398,900.00	257,398,900.00	-	
					Belanja Modal Taman (Perumahan Buana Impian 2 Blok Wish, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam)	128,699,450.00	128,699,450.00	-	
					Belanja Modal Taman (Perumahan Buana View RW 23, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam)	132,364,046.00	132,364,046.00	-	
					Belanja Modal Taman (Perumahan Graha Nusa Batam RW 21, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam)	257,398,900.00	257,398,900.00	-	
					Belanja Modal Taman (Perumahan HPM / Putra Moro Indah 2 dan Sawang Permai RW 13, Kota Batam)	128,699,450.00	128,699,450.00	-	

					Belanja Modal Taman (Perumahan Marina Garden RW 12, Kota Batam)	154,439,795.00	154,439,795.00	-	
					Belanja Modal Taman (Perumahan Taman Cipta Indah II RW 21, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam)	193,049,175.00	193,049,175.00	-	
					Belanja Modal Taman (Perumahan Taman Marchelia RW 9, Kota Batam)	244,529,865.00	244,529,865.00	-	
					Belanja Modal Taman (Perumahan Taman Raya Tahap IV, RW 042, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam)	193,049,175.00	193,049,175.00	-	
					Belanja Modal Taman (Perumahan Villa Mas, Kota Batam)	257,398,900.00	257,398,900.00	-	
					Belanja Modal Taman (Perum Kampoeng Daun RW 17, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam)	193,049,175.00	193,049,175.00	-	
					Belanja Modal Taman (Perum Puri Agung II RW 06, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam)	257,398,900.00	257,398,900.00	-	
					Belanja Modal Taman (RW 03 Perumahan GMP Tahap 1, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam)	128,699,450.00	128,699,450.00	-	
					Belanja Modal Taman (RW 09 Kavling Air Raja, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam)	193,049,175.00	193,049,175.00	-	
TOTAL						121,433,229,887.00	122,087,192,556.00	653,962,669.00	

**3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023**

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah Kota Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023, memprioritaskan pembangunan daerah sektor infrastruktur dasar sehingga perlu peningkatan kualitas baik perencanaan maupun pembangunan dengan meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pembangunan secara maksimal.

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan pada tahun 2023 yang dilaksanakan merupakan kegiatan lanjutan dan pendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota Batam periode 2021-2026 yakni :

” Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera.”

Adapun misi Walikota periode 2021-2026 yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam adalah :

- 1. MISI II : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
- 2. MISI IV : Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan pada anggaran Perubahan APBD tahun 2023 meliputi 5 (lima) program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan sebagai berikut :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota**

II. Program Pengembangan Perumahan

III. Program Kawasan Permukiman

IV. Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)

V. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kelima program dan kegiatan tersebut diwujudkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dipetakan sesuai dengan Urusan yang diampu dinas sehingga menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lokasi pelaksanaan program , kegiatan dan sub kegiatan adalah seluruh wilayah kota batam baik perkotaan maupun hinterland yang terbagi atas beberapa fokus yakni masyarakat pada umumnya dan peningkatan dan penataan taman kota serta penataan kawasan kumuh dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman.

Dari kelima program yang dilaksanakan, terdapat 2 (dua) program yang menunjang pelayanan urusan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam yakni Program Pengembangan Perumahan yang berisikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan SPM dan Program Kawasan Permukiman yang merupakan program DAK yang sejalan dengan pelayanan urusan yang diampu yakni urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pentingnya kedua program ini untuk dilaksanakan tentunya tidak terlepas dari perwujudan visi dan misi Walikota Batam terpilih dan menunjang pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Tahun 2023 APBD Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam masih fokus pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar permukiman yang bersumber dari anggaran APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN. Adapun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan apbd Perubahan untuk tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 sesuai dengan dokumen rencana strategis dinas sebagaimana tertuang pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kota Batam

Tabel T-C 33

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Tar get		
										Sebe lum	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah	Sebelum						Sesudah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								92,717,308,856	95,528,563,073				138,345,461,075				
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								12,671,991,945	12,300,813,525				16,332,419,546				
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0	0				19,800,000.00				

1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	100%	0	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	8,800,000
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	0	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5,500,000
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	0	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5,500,000
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9,659,133,525	9,263,869,633	11,951,596,011			

1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	100 %	52 Orang/Bulan	52 Orang/Bulan	100 %	100 %	9,481,463,525	9,086,199,633	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	11,807,162,793
---	----	----	------	----	-----------------------------------	--	---	--	--------------------------------------	-------	-------	----------------	----------------	-------	-------	---------------	---------------	--	--	-------	----------------

1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	177,670,000	177,670,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	144,433,218
1	04	01	2.1		Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah											85,460,000	85,460,000					210,915,562
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	100 %	6 Orang	6 Orang	100 %	100 %	85,460,000	85,460,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	210,915,562
1	04	01	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah											535,474,500	411,952,500					792,162,203

1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	4,505,000	4,505,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3,765,355
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	100 %	10 Paket	10 Paket	100 %	100 %	255,409,500	185,328,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	356,061,739
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	100 %	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	129,600,000	129,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	144,973,400
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	30,600,000	27,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	30,794,838

1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	7,200,000	7,200,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	7,712,817
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	108,160,000	58,319,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	248,854,054
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											894,844,500	791,528,500				1,449,658,874
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	2 Paket	2 Paket	100%	100%	117,750,000	117,750,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	130,530,400

1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	100 %	45 Unit	45 Unit	100 %	100 %	777,094,500	673,778,500	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,319,128,474
1	04	01	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,070,363,920	1,030,718,320					1,131,145,947
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	381,000,000	381,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	408,136,588
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	5,250,000	5,250,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,623,929

1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	100 %	13 Laporan	13 Laporan	100 %	100 %	684,113,920	644,468,320	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	717,385,430
1	04	01	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											426,715,500	717,284,572				777,140,949
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	100 %	24 Unit	24 Unit	100 %	100 %	383,035,500	400,635,500	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	424,981,595

1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100%	100%	59 Unit	59 Unit	100%	100%	43,680,000	43,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	79,190,282
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100% 1 Unit	100%	100%			0	272,969,072	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	272,969,072
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											2,376,578,820	2,370,057,220				3,813,841,675	
1	04	02	2		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota											333,712,750	333,712,750				422,333,528	

1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100%	100% 100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100% 100%	129,999,000	129,999,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	100% 100%	141,316,22
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100%	100% 100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100% 100%	0	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	100% 100%	281,017,306
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100%	100% 100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100% 100%	203,713,750	203,713,750	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase	100% 100%	0

						Rumah Susun Layak Huni													Rumah Susun Layak Huni		
1	0 4	0 2	2. 05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus										1,885,773 ,970	1,885,773 ,970					3,228,752 ,847
1	0 4	0 2	2. 05	0 2	Penatausaha an Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persent ase Relokasi Korban Bencan a yang Ditanga ni Persent ase Rumah Susun Layak Huni	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persent ase Rumah Susun Layak Huni	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncan g	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Doku men	1 Doku men	95 %	95 %	1,885,773, 970	1,885,773, 970	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Persent ase Relokasi Korban Bencan a yang Ditanga ni Persent ase Rumah Susun Layak Huni	100 % 100 %	3,228,752, 847
1	0 4	0 2	2. 06		Penerbitan Izin Pembangun an dan Pengembang an Perumahan											157,092,1 00	150,570,5 00				162,755,3 00

1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	Persentase Rumah Susun Layak Huni	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	95 %	95 %	157,092,100	150,570,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	100 % 100 %	162,755,300
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											0	0				1,809,384,115
1	04	03	2		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha											0	0				1,809,384,115

1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Permu kuman Kumuh	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permu kuman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Peremukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki di Wilayah Perkot aan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	59.53 %	59.53 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permu kuman Kumuh	100 % 100 %	428,489,856
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permu kuman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Wilayah Hinterland	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki di Wilayah Perkot aan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	30 Unit	30 Unit	59.53 %	59.53 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permu kuman Kumuh	100 % 100 %	746,545,272

1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki di Wilayah Perkotaan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	0.576 Ha	0.576 Ha	59.53 %	59.53 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	100 % 100 %	634,348,987
1	04	05			PRORAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											77,668,738,091	80,857,692,328				116,389,815,739
1	04	05	2		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan											77,668,738,091	80,857,692,328				116,389,815,739

1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	97.02 % 97.02 %	532,174,500 532,174,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	100 % 100 %	737,823,110
---	----	----	------	----	--------------------------------------	--	---	---	--	----------------	----------------	-----------	-----------	--------------------	----------------------------	------------------------------	--	----------------	-------------

1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	351 Lokasi	380 Lokasi	97.02 %	97.02 %	74,559,574,171	77,737,100,408	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembiayaan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	100 % 100 %	112,816,323,297
---	----	----	------	----	--	--	---	---	--	----------------	----------------	------------	------------	---------	---------	----------------	----------------	---	--	----------------	-----------------

1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	97.02 %	97.02 %	2,257,200,920	2,285,400,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	100 % 100 %	2,504,475,875
---	----	----	------	----	--	--	---	---	--	----------------	----------------	-----------	-----------	---------	---------	---------------	---------------	------------------------------	--	----------------	---------------

1	04	05	2.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	97.02 % 97.02 %	319,788,500	303,016,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Kota an Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	100 % 100 %	331,193,457
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										20,154,599,831	18,162,042,331				36,172,282,211
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										20,154,599,831	18,162,042,331				36,172,282,211

2	1 1	4			PROGRAM PENGELOLA AN KEANEKAR AGAMAN HAYATI (KEHATI)											20,154,59 9,831	18,162,04 2,331					36,172,28 2,211
2	1 1	4	2		Pengelolaan Keanekarag aman Hayati Kabupaten/ Kota											20,154,59 9,831	18,162,04 2,331					36,172,28 2,211
2	1 1	0 4	2. 01	0 2	Pengelolaan Taman Keanekaraga man Hayati di Luar Kawasan Hutan	Persent ase Luas RTH Publik yang Dikelola	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Persent ase Luas RTH Publik yang Dikelola	Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	5.46 %	5.46 %	174.4 5 Ha	174.4 5 Ha	5.44 %	5.44 %	10,301,22 5,000	10,073,67 5,800	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Pendapa tan Bagi Hasil		Persent ase Luas RTH Publik yang Dikelola	5.4 6 %	12,333,57 5,320
2	1 1	0 4	2. 01	0 3	Pengelolaan Kebun Raya	Persent ase Luas RTH Publik yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Persent ase Luas RTH Publik yang Dikelola	Kota Batam, Nongs a, Samba u	5.46 %	5.46 %	29 Ha	29 Ha	5.44 %	5.44 %	1,806,514, 800	1,799,430, 500	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		Persent ase Luas RTH Publik yang Dikelola	5.4 6 %	1,987,166, 280

2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.46 %	5.46 %	0 Ha 24.55 Ha	0 Ha 24.55 Ha	5.44 %	5.44 %	3,972,261,450	2,214,337,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	5.46 %	11,217,405,603
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.46 %	5.46 %	0.3 Ha	0.3 Ha	5.44 %	5.44 %	4,074,598,581	4,074,598,581	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	5.46 %	10,634,135,008
TOTAL																112,871,908,687	113,690,605,404					174,517,743,286
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											8,561,321,200	8,940,358,400				9,417,452,880	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											8,561,321,200	8,940,358,400				9,417,452,880	
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus											8,561,321,200	8,940,358,400				9,417,452,880	

1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Susun Layak Huni	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Ung	100 % 100 %	100 % 100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	95 %	95 %	8,561,321,200	8,940,358,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	100 % 100 %	9,417,452,880
TOTAL																8,561,321,200	8,940,358,400				9,417,452,880

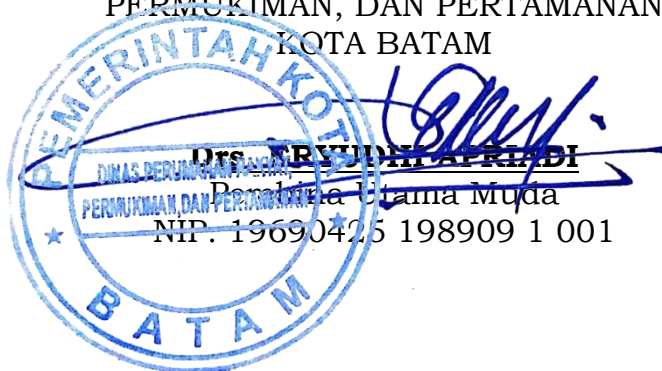
BAB IV P E N U T U P

Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, Perangkat Daerah dan Pokok Pikiran DPRD dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Batam kedepan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rancangan perubahan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Kota Batam, APBD Provinsi dan APBN Tahun Anggaran 2023.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023 digunakan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Perubahan Keuangan dan Penganggaran dinas pada tahun 2023.

Batam, Agustus 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN
KOTA BATAM





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN
PERTAMANAN

Jl. Kartini 1 No. 29 Sei. Harapan Sekupang Telp. (0778) 8016062, Fax. (0778) 8016062

Email : perakimjan@batam.go.id

BATAM

Kode Pos. 29425

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

Nomor : KPTS. 049/RP.01.00/XII/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2023 DAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN
KOTA BATAM

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan...

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021-2026;
23. Peraturan Wali Kota Batam Nomor: 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;

24. Keputusan Wali Kota...

24. Keputusan Walikota Batam Nomor :
KPTS.76/HK/II/2021 Tentang Pendelegasian
Penandatanganan Keputusan Tentang Tim Penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kepada Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2024 Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan
Pertamanan Kota Batam ;
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Perubahan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat,
Permukiman dan Pertamanan Kota Batam terdiri dari
pejabat dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat,
Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas
Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota
Batam dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan
tugas secara penuh dalam menyiapkan/menyusun
Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2023,
Rancangan Awal Renja Tahun 2024, Rancangan Renja
Tahun 2024, Rancangan Akhir Renja Tahun 2024
sampai dengan Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 05 Desember 2022

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Permukiman
dan Pertamanan Kota Batam



Drs. Eryudhi Apriadi
Pembina Utama Muda
NIP. 19690425 198909 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam

Nomor : KPTS. 049/RP.01.00/XII/2022

Tanggal : 05 Desember 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 DAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN
KOTA BATAM**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS	PENANGGUNGJAWAB
2.	SEKRETARIS	KETUA
3.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	SEKRETARIS
I.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERUMAHAN	
NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Perumahan Rakyat	Koordinator
2.	Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Anggota
3.	Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Anggota
4.	Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Anggota
II.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERMUKIMAN	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Permukiman	Koordinator
2.	Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Anggota
3.	Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Anggota
4.	Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Anggota
III.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	
NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman	Koordinator
2.	Analisis Perkebun Raya	Anggota
3.	Analisis Perkebun Raya	Anggota
4.	Analisis Kebijakan	Anggota

IV.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI UPT RUSUNAWA	
NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala UPT Rusunawa Kota Batam	Koordinator
2.	Kasubbag TU UPT Rusunawa Kota Batam	Anggota
V.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI UPT KEBUN RAYA	
NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala UPT. Kebun Raya Batam	Koordinator
2.	Kasubbag TU UPT Kebun Raya Batam	Anggota

Ditetapkan di : Batam
 Pada tanggal : 05 Desember 2022

Kepala Dinas
 Perumahan Rakyat, Permukiman dan
 Pertamanan Kota Batam



Drs. Eryadhi Apriadi
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690425 198909 1 001